

LAPORAN

KINERJA TAHUN 2024



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN YOGYAKARTA
2025**

Kata Pengantar

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya. Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi.

Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Yogyakarta sebagai salah satu instansi pemerintah juga tidak terlepas dari kewajiban tersebut. Laporan Kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 ini merupakan pemenuhan atas kewajiban tersebut sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Melalui laporan kinerja ini, diuraikan rencana kinerja, pencapaian kinerja, serta realisasi anggaran sepanjang tahun 2024. Semoga bermanfaat bagi kalangan luas, terutama pihak-pihak yang terkait.

Yogyakarta, Januari 2025
Kepala Balai,



Ditandatangani secara elektronik
Endang Widajati



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja BDK Yogyakarta Tahun 2024 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi sepanjang tahun 2024 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi organisasi. Laporan Kinerja dapat digunakan sebagai upaya perbaikan untuk meningkatkan kinerja BDK Yogyakarta.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.01/2022 Tanggal 18 April 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Balai Diklat Keuangan Yogyakarta merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan melalui sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

1.2 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 79/PMK.01/2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan terhitung mulai tanggal 18 April 2023 Balai Pendidikan dan Keuangan memiliki struktur organisasi baru.

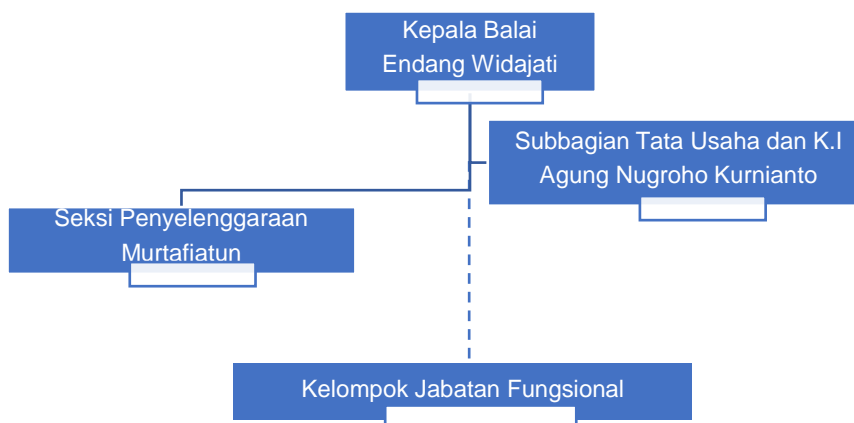
Tugas pokok dan fungsi Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan sebagaimana tercantum di Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 79/PMK.01/2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Balai Diklat Keuangan mempunyai tugas untuk melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun fungsi Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Yogyakarta meliputi hal-hal sebagai berikut:



1. pemberian dukungan teknis pelaksanaan analisis kebutuhan pembelajaran di wilayah kerja Balai Diklat Keuangan;
2. penyelenggaraan pembelajaran dan fasilitas implementasi sistem pembelajaran di bidang keuangan negara;
3. pemberian dukungan teknis pelaksanaan evaluasi pembelajaran di bidang keuangan negara di wilayah kerja Balai Diklat Keuangan;
4. pemberian dukungan teknis pelaksanaan sertifikasi dan uji kompetensi;
5. penerapan proses manajemen pengetahuan dan organisasi pembelajaran di lingkungan Balai Diklat Keuangan;
6. pelaksanaan asistensi penerapan proses manajemen pengetahuan dan organisasi pembelajar di wilayah kerja Balai Diklat Keuangan;
7. penyusunan rencana kerja dan anggaran Balai Diklat Keuangan;
8. pengelolaan data dan informasi, kinerja dan risiko di lingkungan Balai Diklat Keuangan;
9. pengelolaan komunikasi publik di lingkungan Balai Diklat Keuangan;
10. pelaksanaan manajemen mutu pembelajaran di lingkungan Balai Diklat Keuangan;
11. pemantauan pengendalian intern dan kepatuhan internal terhadap kode etik dan disiplin di lingkungan Balai Diklat Keuangan;
12. pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan pemberian rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan Balai Diklat Keuangan;
13. pengembangan sumber daya manusia Balai Diklat Keuangan;
14. pelaksanaan administrasi Balai Diklat Keuangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 79/PMK.01/2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Balai Diklat Keuangan Yogyakarta memiliki satu Jabatan Eselon III, dua Jabatan Eselon IV, serta jabatan fungsional. Struktur organisasi Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Yogyakarta secara lengkap dapat dilihat dalam **Gambar 1.1**. Seperti terlihat dalam gambar di bawah.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi BDK Yogyakarta



1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal

Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran, urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, pemeliharaan sarana dan prasarana, pengelolaan perpustakaan, fasilitasi dukungan teknis layanan pembelajaran, penerapan proses manajemen pengetahuan dan organisasi pembelajar, pengelolaan komunikasi publik, pengelolaan data dan informasi, kinerja dan risiko, pelaksanaan penjaminan mutu layanan pembelajaran, pemantauan pengendalian *intern* dan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, serta pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan pemberian rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan Balai Diklat Keuangan.

2. Seksi Penyelenggaraan

Seksi Penyelenggaraan Pembelajaran mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan pembelajaran terkait keuangan negara, fasilitasi implementasi sistem pembelajaran, dan fasilitasi dukungan teknis pelaksanaan analisis kebutuhan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, sertifikasi, dan uji kompetensi, serta penyelenggaraan layanan asistensi penerapan proses manajemen pengetahuan dan organisasi pembelajar di wilayah kerja Balai Diklat Keuangan.

3. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional Widyaiswara memiliki tugas pokok Widyaiswara adalah mendidik, mengajar, dan/atau melatih Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Lembaga Diklat Pemerintah masing-masing. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Widyaiswara harus mendapatkan penugasan secara tertulis dari pimpinan lembaga diklat pemerintah yang bersangkutan dan dengan mengacu pada peraturan-peraturan terkait dengan jabatan fungsional Widyaiswara.

Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN yang selanjutnya disebut dengan Pranata Keuangan APBN adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja kementerian negara/lembaga sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Balai Diklat Yogyakarta didukung oleh pegawai yang terdiri dari satu pejabat administrator, dua pejabat pengawas, lima pejabat fungsional (Widyaiswara), satu pejabat fungsional keuangan dan pelaksana sebanyak 16 pegawai.

Diagram 1.1 Data Pegawai BDK Yogyakarta





1.3 Sistematika Laporan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 ini terdiri dari empat bab dan disajikan dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi
- 1.3 Sistematika Laporan

BAB II Perencanaan Kinerja

- 2.1 Perencanaan Strategis
- 2.2 Perencanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- 2.3 Perencanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

BAB IV Akuntabilitas Kinerja

- 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama
- 3.2 Realisasi Anggaran
- 3.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- 3.4 Kinerja Lain-lain
- 3.5 Evaluasi Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

BAB IV Penutup



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan suatu perangkat manajemen dalam memandangi masa depan dan melihat peluang atau tantangannya untuk mencapai visi dan menjalankan misi organisasi. Perencanaan strategis tidak hanya memperkirakan kejadian masa depan, namun juga mempengaruhi masa depan melalui mobilisasi sumber daya dan kegiatan.

Perencanaan strategis akan diimplementasikan oleh organisasi beserta seluruh pegawai di dalamnya dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi dengan memperhatikan faktor internal dan lingkungan strategis. Rencana strategis Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Yogyakarta sebagai unit pelaksana teknis Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan meliputi visi, misi, kegiatan, dan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

1. Visi Organisasi

Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Yogyakarta memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan para pegawai Kementerian Keuangan khususnya di daerah memiliki kemampuan yang memadai dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam menjalankan peran tersebut, Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Yogyakarta menetapkan visi “Menjadi pengelola diklat terunggul dan dipercaya masyarakat dalam menghasilkan manusia yang profesional di bidang keuangan negara di daerah”.

2. Misi Organisasi

Dalam menunjang tercapainya visi tersebut, Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Yogyakarta menetapkan misi sebagai berikut:

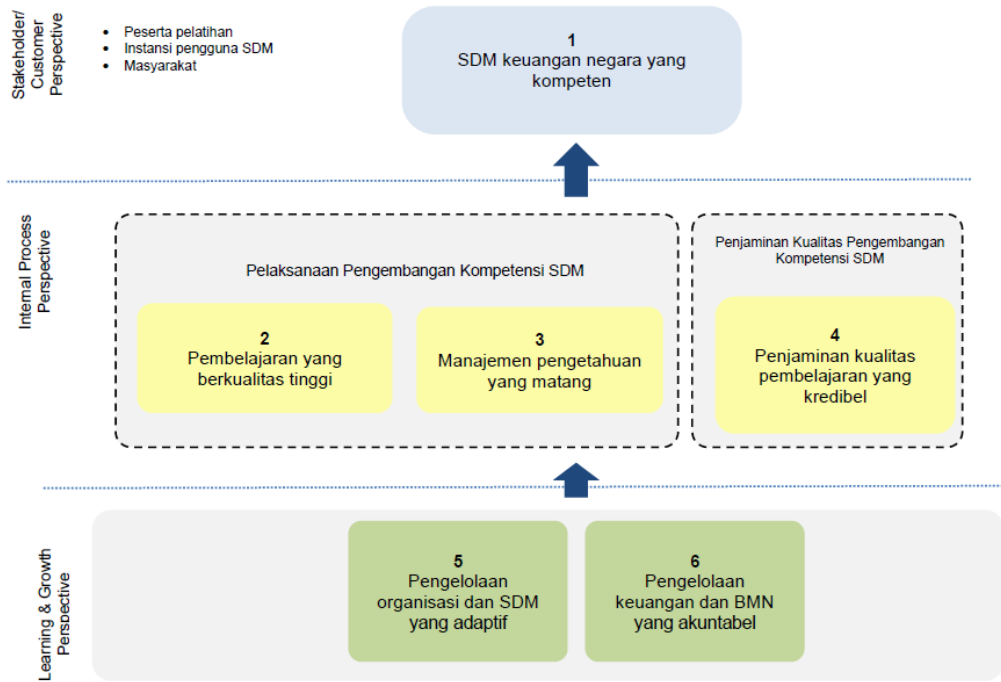
- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang keuangan negara di daerah melalui pendidikan dan pelatihan.
- 2) Senantiasa memperbarui diri melalui proses organisasi belajar (*learning organization*) sesuai dengan dinamika lingkungan internal dan eksternal.
- 3) Berpartisipasi dalam mengembangkan masyarakat yang sadar keuangan negara.

2.2 Penyusunan Rencana Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Strategy map atau peta strategi adalah sebuah diagram yang menunjukkan visi, misi dan strategi organisasi yang diimplementasikan dalam aktivitas sehari-hari pada setiap unit bisnis. Dalam meningkatkan penyelenggaraan proses bisnisnya Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Yogyakarta merumuskan peta strategi yang nantinya akan diimplementasikan oleh semua jajaran dalam rangka mencapai visi dan misi. Berikut adalah peta strategi Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Yogyakarta.



Diagram 2.1 Peta Strategi Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Yogyakarta



1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Yogyakarta

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis, Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Yogyakarta menyusun perjanjian kinerja yang secara rinci dapat di lihat pada **Tabel 2.2**.

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1.	SDM Keuangan Negara yang Kompeten	1.	1a-CP Indeks Integritas Organisasi	100
		2.	1b-CP Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan	100%
		3.	1c-N Tingkat Implementasi Learning Organization	100
2.	Pembelajaran yang Berkualitas Tinggi	4.	2a-CP Tingkat Implementasi Pembelajaran yang Berkualitas Tinggi	4,35
3.	Manajemen Pengetahuan yang Matang	5.	3a-N Tingkat Optimalisasi Proses Bisnis Manajemen Pengetahuan	100
		6.	3b-N Persentase Pemanfaatan <i>Knowledge</i> pada Platform KLC	100%
4.	Penjaminan Kualitas Pembelajaran yang Kridibel	7.	4a-CP Indeks Pemenuhan Standar Kualitas Pembelajaran	100%
5.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif	8.	5a-CP Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM	100%
		9.	5b-N Tingkat Kualitas Pelaksanaan program/kegiatan kebintalan	80
6.	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel	10.	6a-CP Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA 15 (IKKPA)	100
		11.	6b-CP Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	84,10



2. Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah usaha untuk mengelola risiko dengan cara memonitor sumber risiko, melacak, dan melakukan serangkaian upaya agar dampak risiko bisa diminimalisasi. Salah satu tujuan dari manajemen risiko adalah menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya.

Balai Diklat Keuangan Yogyakarta tahun 2024 menetapkan tiga sasaran risiko untuk dimitigasi sebagai berikut.

No	Sasaran	Risiko
a	SDM Pengelola Keuangan Negara yang Kompeten	Adanya tangkap tangan, pungutan liar (pungli), tindakan korupsi yang terverifikasi oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI), Itjen, dan/atau dideteksi oleh Aparat Penegak Hukum disebabkan kurangnya internalisasi nilai integritas kepada seluruh pegawai.
b	SDM Pengelola Keuangan Negara yang Kompeten	Loyalitas pegawai yang rendah terhadap organisasi dikarenakan rendahnya komitmen pegawai terhadap organisasi.
c	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	Nilai IKKPA tidak mencapai target dikarenakan deviasi pada realisasi belanja dibandingkan perencanaan.

3. Anggaran

Program Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Yogyakarta adalah Program Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi di Bidang Keuangan Negara sedangkan kegiatan Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Yogyakarta adalah Pengembangan SDM melalui Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Negara di Daerah.

Untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut, Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2024 mendapatkan alokasi revisi anggaran sebesar Rp.5.238.170.000. Dari jumlah pagu anggaran tersebut dialokasikan untuk enam *output* yaitu Sarana Bidang Teknologi Informasi, Layanan Dukungan Manajemen Internal, Layanan Sarana dan Prasarana Intenal, Pelatihan Bidang Ekonomi dan Keuangan, Layanan Dukungan Manajemen Internal, Layanan Manajemen SDM Internal.

Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2024 terdiri dari dua program sebagai berikut.

1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.470.835.000.
2. Pengelolaan Organisasi dan SDM dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.767.335.000.

Berikut pembagian anggaran berdasarkan rincian output (RO) seperti tersaji pada **Tabel 2.1.**



Tabel 2.1 Ringkasan Anggaran Berdasarkan Jenis RO

No	Kode	Uraian	Pagu (Rp)
1	4679.CAN.101	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	119.160.000
2	4679.EBA.103	Rencana Kebutuhan BMN dan Pengelolaan Unit	5.000.000
3	4679.EBA.105	Kerumahtangaan	78.890.000
4	4679.EBA.994	Layanan Perkantoran	2.144.744.000
5	4679.EBB.102	Peralatan Fasilitas Perkantoran	123.041.000
6	4683.DCF.102	Pembelajaran Digital	384.691.000
7	4683.DCF.103	Pembelajaran Klasikal	1.502.566.000
8	4683.DCF.106	Manajemen Pengetahuan	2.300.000
9	4683.DCF.311	Pelatihan dalam Rangka Perluasan JF Pemeriksa Pajak (PU)	338.131.000
10	4683.DCF.312	Pelatihan Optimalisasi Pemanfaatn BMN pada Pemerintah Pusat dan Daerah (PU)	58.860.000
11	4683.DCF.314	Pelatihan Penguatan Pengawasan di Kawasan Perbatasan (PU)	188.498.000
12	4683.EBA.109	AKP Kewilayahan	34.396.000
13	4683.EBA.994	Layanan Perkantoran	227.383.000
14	4683.EBC.101	Pengembangan SDM	30.510.000
Total			5.238.170.000

2.3 Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Rencana IKU 2025 adalah rencana untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan dicapai dalam tahun 2025. IKU disusun untuk dijadikan pedoman standar dalam merealisasikan target dan sasaran yang akan dicapai.

IKU cascading peta yang dilaksanakan tahun 2024 antara lain Indeks integritas organisasi, tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan, tingkat implementasi pembelajaran yang berkualitas tinggi, indeks pemenuhan standar kualitas pembelajaran, tingkat kualitas pengelolaan SDM, indeks kualitas kualitas pengelolaan keuangan BA 15 (IKKPA) dan indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan.

Sementara IKU NonCascading antara lain, tingkat implementasi learning organization, tingkat optimalisasi proses bisnis manajemen pengetahuan, persentase pemanfaatan knowledge pada paltform KLC dan tingkat kualitas pelaksanaan program kegiatan kebintalan.



BAB III AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN KINERJA

3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sesuai Kontrak Kinerja yang telah ditetapkan Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Yogyakarta Tahun 2024 terdiri dari 11 Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk 6 Sasaran Strategis. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Yogyakarta sampai dengan tahun 2024 adalah sebagaimana disajikan dalam **Tabel 3.1**.

Tabel 3.1 Target dan Capaian IKU Tahun Anggaran 2024

Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Q4	Capaian
SDM Keuangan Negara yang Kompeten	1	Indeks Integritas Organisasi	100	101,99	101,99
	2	Tingkat Kepuasan <i>Stakeholder</i> dan Pengguna Layanan	100%	117,46	117,46
	3	Tingkat Implementasi <i>Learning Organization</i>	100	110,05	110,05
Pembelajaran yang Berkualitas Tinggi	4	Tingkat Implementasi Pembelajaran yang Berkualitas Tinggi	4,35	4,81	110,53
Manajemen Pengetahuan yang Matang	5	Tingkat Optimalisasi Proses Bisnis Manajemen Pengetahuan	100	120	120
	6	Persentase Pemanfaatan <i>Knowledge</i> pada <i>Platform KLC</i>	100%	110,80%	110,80
Penjaminan Kualitas Pembelajaran yang Kridibel	7	Tingkat Pemenuhan Standar Kualitas Pembelajaran	100%	120%	120
Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif	8	Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM	100%	117,31%	117,31
	9	Tingkat Kualitas Pelaksanaan program/kegiatan keibintalan	80	107	120
Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel	10	Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA 15 (IKKPA)	100	120	120
	11	Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	84,10	99,6	118,43

IKU 1. Indeks Integritas Organisasi

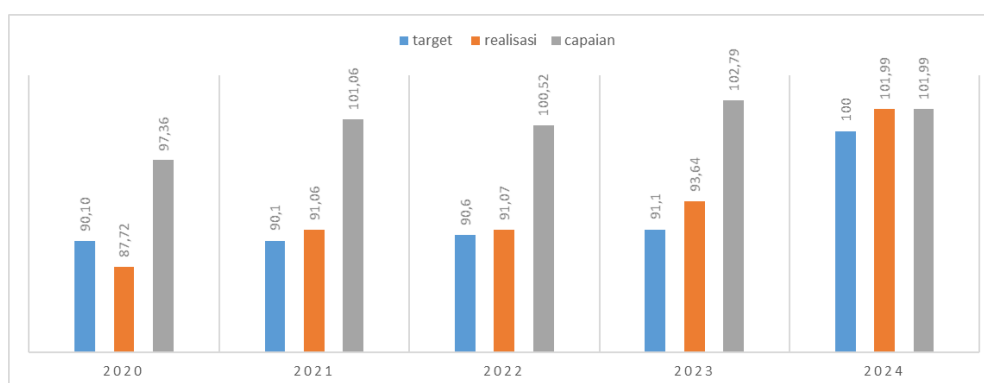
BDK Yogyakarta 1a-CP	SS – SDM keuangan negara yang kompeten							
	Indeks Integritas Organisasi							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLKV
Realisasi	120	106,67	106,67	107,2	107,2	101,99	101,99	
Capaian	120	106,67	106,67	107,2	107,2	101,99	101,99	

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*). Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih



di Kemenkeu dicerminkan antara lain melalui persepsi atas integritas organisasi. IKU ini bertujuan untuk menilai tingkat integritas organisasi Kementerian Keuangan.

Capaian IKU Indeks Integritas perhitungan dilakukan oleh pusat dengan target tahunan sebesar 100 sampai akhir tahun 2024 realisasi sebesar 101,99 dan capaian 101,99. Realisasi indeks persepsi integritas tahun 2024 terjadi penurunan dibandingkan tahun 2023, tahun 2020 indeks persepsi integritas berada dalam realisasi terendah dalam dengan nilai 87,72 sebagaimana **Grafik 3.1** di bawah ini.



Grafik 3.1 Capaian IKU Indeks Persepsi Integritas tahun 2020 s.d. 2024

Isu utama dan implikasi, dalam IKU ini komponen yang diukur pada Balai Diklat Keuangan adalah:

- Survei penilaian integritas (instrumen olej KPK yang disempurnakan oleh Itjen)
- Downgrade* WBK (minimize).

Akar masalah dalam pelaksanaan IKU ini adalah mekanismen pengawasan dan pengendalian internal masih membutuhkan penguatan terutama terkait efektivitas *early warning system*, saluran pengaduan dan sosialisasi antikorupsi.

Tindakan *extrac effort* yang telah dilaksanakan adalah untuk mencapai IKU ini adalah.

- Sosialisasi integritas terhadap seluruh pegawai ASN dan PPNPN BDK Yogyakarta.
- Mengedarkan ND Imbauan Tidak Memberikan Gratifikasi dalam rangka Perayaan Hari Raya Idul Fitri 1445 H.
- Sosialisasi Antikorupsi: Lebaran Lebih Nyaman Tanpa Gratifikasi (5 April 2024).
- Sosialisasi Antikorupsi: Peran Masyarakat Dalam Peningkatan Budaya Integritas (25 Juni 2024).

Rekomendasi rencana aksi yang akan diperlukan untuk menjaga agar penilaian IKU integritas dapat dilaksanakan dengan sosialisasi integritas kepada pegawai secara rutin.

IKU ini masuk ke dalam pemantauan risiko, yaitu risiko Adanya tangkap tangan, pungutan liar (pungli), tindakan korupsi yang terverifikasi oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI), Itjen, dan/atau dideteksi oleh Aparat Penegak Hukum disebabkan kurangnya internalisasi nilai integritas kepada seluruh pegawai. Level risiko yang ditetapkan pada awal tahun pada level 17. Triwulan IV risiko adanya tangkap tangan, pungutan liar (pungli), tindakan korupsi turun ke level rendah



yaitu 11. Penurunan besaran risiko ini mengacu pada tidak terdapatnya laporan pengaduan tindakan fraud oleh pegawai hingga akhir tahun. Upaya internalisasi integritas telah dilaksanakan sepanjang tahun.

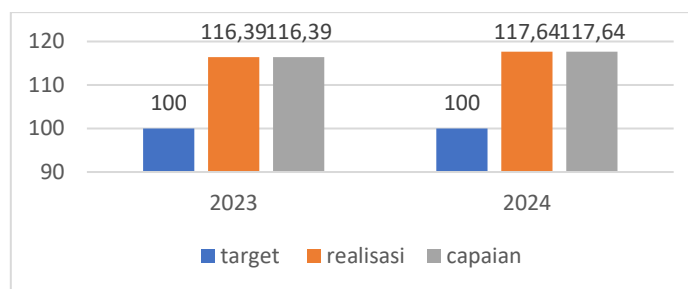
Mitigasi yang telah dilakukan agar risiko ini tidak terjadi adalah dengan melaksanakan internalisasi budaya anti korupsi melalui sosialisasi.

IKU 2. Tingkat Pemenuhan Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan

BDK Yogyakarta 1b-CP	SS - SDM keuangan negara yang kompeten							
	Tingkat Kepuasan <i>Stakeholder</i> dan Pengguna Layanan							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	PoI/KP
Target	20%	50%	50%	70%	70%	100%	100%	Max/TLKV
Realisasi	40%	100	100	100	100	117,46	117,46	
Capaian	120	120	120	120	120	117,64	117,46	

Pelaksanaan Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan dan Pengguna Layanan Kemenkeu (SKPKPL) merupakan tolok ukur untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Kementerian Keuangan kepada masyarakat, pengguna layanan dan stakeholders. Dalam menyelenggarakan survei, untuk menjamin independensi, Kementerian Keuangan bekerjasama dengan lembaga/tim peneliti independen penyelenggara survei untuk dapat memperoleh nilai atau angka berupa Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) dan Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (IKPK) serta penyelesaian rekomendasi perbaikan pada masing-masing Unit Eselon I/LNSW berdasarkan survei yang dilakukan pada kota-kota yang ditunjuk untuk dapat menggambarkan pelayanan Kemenkeu secara keseluruhan.

IKU Tingkat Pemenuhan Kepuasan *stakeholder* dan Pengguna Layanan pada tahun 2024 dengan target sebesar 100% realisasi 117,46% dengan nilai capaian 117,46. Realisasi tingkat kepuasan pengguna layanan dalam lima tahun seperti **Grafik 3.2** di bawah.



Grafik 3.2 Capain IKU Pemenuhan Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan

Terdapat perbedaan pada satuan pengukuran pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 yaitu satuan pengukuran menggunakan indeks, namun mulai tahun 2023 satuan pengukuran menggunakan persentase, sehingga terdapat perbedaan pada nilai target dan realisasi sebagaimana pada **Grafik 3.2**.



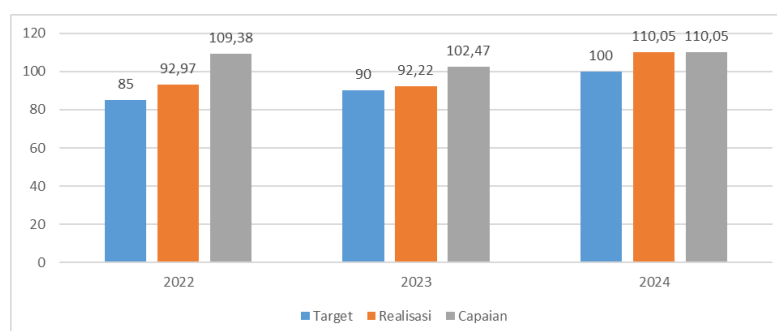
IKU ini mengukur kepuasan pengguna layanan dan tindak lanjut hasil rekomendasi, dengan reformulasi di tahun 2024 juga akan mengukur kepuasan stakeholder, tingkat kepuasan pada BDK adalah layanan PJJ.

Extra Effort yang telah dilakukan dalam mengimplementasikan IKU ini adalah meningkatkan pelayanan kepada stakeholder, agar pelayanan yang diberikan dapat memenuhi standar yang diharapkan oleh stakeholder.

IKU 3. Indeks Implementasi *Learning Organization*

BDK Yogyakarta 1c-N	SS - SDM keuangan negara yang kompeten							
	Tingkat implementasi <i>learning organization</i>							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Y	PoI/KP
Target	9	17	17	25	25	100	100	Max/TLKV
Realisasi	10	30	30	30	30	110,05	110,05	
Capaian	111,11	120	120	120	120	110,05	110,05	

IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat implementasi *learning organization* di lingkungan BPPK dari perspektif sebagai unit pengelola pembelajaran dan sebagai pengguna pembelajaran. Pengukuran IKU dilaksanakan secara tahunan sehingga sampai dengan akhir tahun 2024 dengan target 110 realisasi sebesar 110,05 dan capaian 110,05. Capaian IKU tingkat implementasi *learning organization* tahun 2022 dan 2024 sebagaimana **Grafik. 3.3** dibawah. Terdapat peningkatan nilai realisasi dari tahun 2024 dibandingkan tahun 2023.



Grafik 3.3 Capain IKU Implementasi *Learning Organization*

Isu utama dan implikasi dalam pelaksanaan IKU ini adalah.

1. Tingkat *learning organization* dilakukan dengan komponen penilaian terdiri dari 10 komponen, *Strategic fit and management commitment, Learning function organization, Learning spaces, Learning solutions, Leaders as teachers, Learners, Knowledge Management Implementation, Feedback, Learning value chain, Learners performance.*
2. Nilai Tingkat implementasi *Learning Organization* diperoleh dari 40% hasil survei, 30% hasil *self assessment*, dan 30% hasil penilaian komite *Learning Organization*.
3. Pengukuran dilakukan dengan berpedoman pada KMK-2/KM.11/2022 tentang Perubahan Penilaian Tingkat Implementasi *Learning Organization* atau ketentuan perubahannya (KMK-2/KM.11/2023).



Tindakan yang telah dilakukan adalah menyusun rencana kerja *Learning Organization* dan mengimplementasikan *Learning Organization* di Balai Diklat Keuangan Yogyakarta.

Asistensi *Learning Organization* dan *Knowledge Management* sudah dilaksanakan empat kali:

1. Menyusun rencana kertas kerja *learning organization*.
2. Sosialisasi dan asistensi LO dan KM kepada stakeholder wilayah DIY pada tanggal 21 Juni 2024.
3. Sosialisasi dan asistensi LO dan KM kepada stakeholder wilayah Jawa Tengah pada tanggal 21 Juni 2024.
4. Asistensi kepada pegawai KPPBC TMP C Magelang pada tanggal 29 Agustus 2024.
5. Asistensi kepada pegawai KPP Pratama Magelang pada tanggal 29 Agustus 2024.
6. *Self assesment* dan pengisian survei *learning organization*.

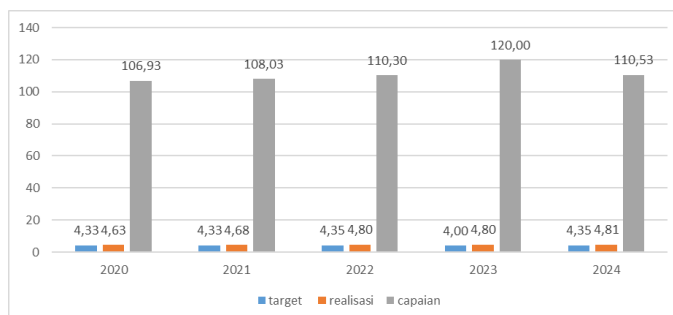
Extra effort yang telah dilaksanakan dalam implementasi *learning organization* adalah, melakukan *knowledge sharing*, keikutsertaan pegawai mengikuti pelatihan, pendokumentasian *knowledge capture*, pengembangan kompetensi pegawai, penyediaan ruang kerja *open space*, pelaksanaan evaluasi pascapelatihan, dan pengelolaan inovasi.

IKU 4. Tingkat Implementasi Pembelajaran yang berkualitas tinggi

BDK Yogyakarta 2a-CP	SS – Pembelajaran yang berkualitas tinggi							
	Tingkat Implementasi pembelajaran yang berkualitas tinggi							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	4,35	4,35	4,35	4,35	4,35	4,35	4,35	Max/TLKV
Realisasi	4,85	4,82	4,82	4,87	4,87	4,81	4,81	
Capaian	111,55	110,78	110,78	111,86	111,86	110,53	110,53	

IKU ini bertujuan untuk mengukur kualitas dari pembelajaran yang diselenggarakan oleh BPPK. Pada 2020 sampai 2023 sebelumnya penamaan IKU ini adalah Indeks persepsi peserta diklat terhadap proses pembelajaran, memiliki tujuan yang sama untuk mengukur indeks rata-rata peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan.

Capaian IKU Tingkat Implementasi Pembelajaran yang berkualitas tinggi dengan target tahun 2024 sebesar 4,35 (skala 5) realisasi 4,81 nilai capaian sebesar 110,53. Nilai realisasi tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sebagaimana terlihat pada **Grafik 3.4** di bawah.



Grafik 3.4 Capaian IKU Implementasi Pembelajaran yang Berkualitas Tinggi



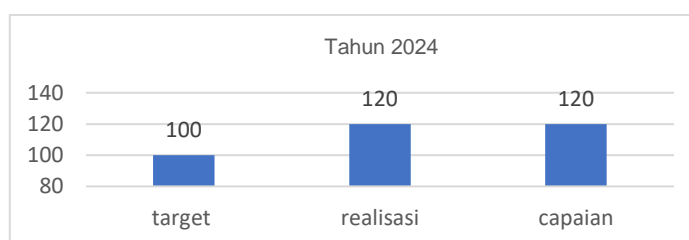
IKU ini mengukur kualitas pembelajaran PJJ, E-learning, dan klasikal menggunakan survei persepsi kepuasan peserta sesuai dengan ketentuan evaluasi pembelajaran di lingkungan BPPK. Terdapat 78 pelatihan (57 PJJ dan 21 klasikal) yang diukur evaluasi pembelajarannya.

IKU 5. Tingkat Optimalisasi Proses Bisnis Manajemen Pengetahuan

BDK Yogyakarta 3a-N	SS – Manajemen pengetahuan yang matang							
	Tingkat optimalisasi proses bisnis manajemen pengetahuan							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Y	Poi/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLKV
Realisasi	120	120	120	120	120	120	120	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

IKU ini bertujuan untuk mengukur implementasi manajemen pengetahuan sesuai tahapan manajemen pengetahuan. IKU ini mengukur nilai implementasi manajemen pengetahuan, dengan komponen: Identifikasi, Dokumentasi, Pengorganisasian (khusus Setban), Penyebarluasan, Pemantauan, Asistensi, Penghargaan (khusus Setban).

Capaian IKU tingkat optimalisasi proses bisnis manajemen pengetahuan sampai dengan tahun 2024 adalah dengan target 100 % nilai realisasi 120% dengan nilai capaian sebesar 120. Realisasi IKU ini tahun 2024 sebagaimana **Grafik.3.5**.



Grafik 3.5 Capain IKU Tingkat Optimalisasi Proses Bisnis Manajemen Pengetahuan

IKU ini merupakan IKU baru yang dilaksanakan tahun 2024, sehingga tidak ada data pembandingan implementasi tahun sebelumnya. Tindakan yang telah dilakukan dalam mengimplementasikan IKU ini adalah;

- Melakukan proses identifikasi untuk menghasilkan daftar pengetahuan kritis. Nota Dinas daftar pengetahuan kritis telah disampaikan kepada Sekretariat Badan.
- Melaksanakan sosialisasi daftar pengetahuan kritis kepada seluruh pegawai tanggal 18 Maret 2024.
- Melaksanakan monitoring progres penyusunan aset intelektual sesuai dengan daftar pengetahuan kritis kepada pejabat pengawas dan pejabat fungsional.
- Menyusun Berita Acara kesesuaian Aset lintelektual dengan daftar pengetahuan kritis.
- Mengunggah video yang sudah diproduksi pada laman KMS.
- Menyebarkan video yang telah di published.

Extra effort yang telah dilakukan untuk mendukung implementasi IKU ini adalah dengan melaksanakan monitoring progres penyusunan aset intelektual agar proses penyusunan dapat



sesuai dengan *timeline* yang telah ditentukan. Selain itu dilakukan kegiatan penyebarluasan aset intelektual yang telah dipublish dengan menggunakan media sosial.

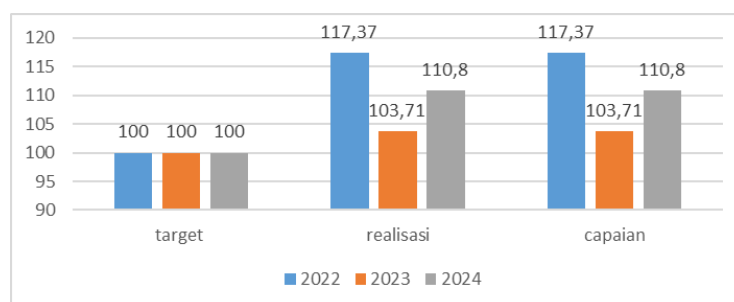
IKU 6. Persentase pemanfaatan *knowledge* pada Platform KLC

BDK Yogyakarta 3b-N	SS – Manajemen Pengetahuan yang matang							
	Persentase pemanfaatan <i>knowledge</i> pada platform KLC							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/TLKV
Realisasi	114,94	114,94%	114,94%	114,94%	114,94%	110,80%	110,80%	
Capaian	114,94	114,94	114,94	114,94	114,94	110,80	110,80	

IKU ini mengukur implementasi manajemen pengetahuan, pada tahapan penerapan aset intelektual, diukur menggunakan 2 komponen yaitu:

1. Tingkat pemanfaatan KLC (rating AI pada KLC)
2. Hasil *Self Assessment* pemanfaatan AI di unit

IKU Persentase Pemanfaatan *Knowledge* pada Platform KLC dengan target tahun 2024 sebesar 100% realisasi 110,80% nilai capaian sebesar 110,80. Capaian realisasi IKU ini tahun 2022 sampai 2024 sebagaimana **Grafik 3.6**.



Grafik 3.6 Capain IKU Pemanfaatan *Knowledge* pada Platform KLC

Terdapat peningkatan realisasi pemanfaatan *knowledge* pada platform KLC pada tahun 2024 di bandingkan tahun 2023, kenaikan sebesar 7,09 poin. Kenaikan tersebut merupakan dampak dari tindak lanjut yang telah dilaksanakan dalam implementasi IKU ini adalah.

1. Menyosialisasikan pemanfaatn KLC (pemberian rating).
2. *Self assessment* atas penerapan aset intelektual.

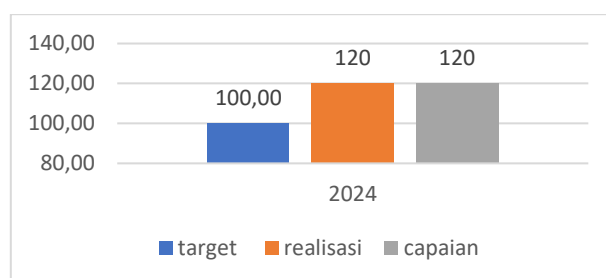
IKU 7. Tingkat Pemenuhan Standar Kualitas Pembelajaran

BDK Yogyakarta 4a-CP	SS – Penjaminan kualitas pembelajaran yang kredibel							
	Tingkat pemenuhan standar kualitas pembelajaran							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Y	Pol/KT
Target	3%	7%	7%	11%	100%	100%	100%	Max/TLKV
Realisasi	25%	25%	25%	25%	25%	120%	120%	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	



IKU ini bertujuan untuk mengukur penyelesaian tindak lanjut rekomendasi penjaminan mutu tahun 2023 dan hasil penjaminan mutu tahun 2024.

Capaian IKU Indeks Pemenuhan Standar Kualitas Pembelajaran penghitungan target secara tahunan, target sampai dengan tahun 2024 adalah 100% dengan nilai realisasi sebesar 120% sehingga nilai capaian menjadi 120. Terdapat perbedaan perhitungan dalam IKU ini dibandingkan tahun sebelumnya, tahun 2024 komponen realisasi IKU merupakan 20% tindaklanjut rekomendasi tahun 2023 ditambahkan dengan 80% hasil penjaminan mutu tahun 2024. Dari sisi satuan pengukuran juga terdapat perbedaan, tahun 2024 satuan pengukuran adalah persentase sedangkan tahun 2023 satuan pengukuran adalah indeks. Capaian realisasi IKU ini tahun 2024 sebagaimana **Grafik 3.6**.



Grafik 3.7. Tingkat Pemenuhan Standar Kualitas Pembelajaran

Realisasi IKU dipengaruhi oleh tindaklanjut yang dilakukan dalam rekomendasi penilaian tahun 2023. Terdapat tujuh rencana tindak lanjut rekomendasi yang perlu dilakukan, yaitu:

1. Terkait rapat persiapan penyelenggaraan pelatihan, melakukan koordinasi lebih awal dengan Pusdiklat sebelum penyelenggaraan pelatihan (mengirimkan ND Permintaan Rekomendasi pengajar pada awal tahun untuk semua program pelatihan ke setiap Pusdiklat).
2. Penetapan jadwal pembelajaran dilakukan sebelum kegiatan bersama dengan pedoman pembelajaran.
3. Pengecekan berjenjang dan dipastikan sama dengan KAP pelatihan dalam penyusunan panduan penyelenggaraan.
4. Rekapitulasi penanganan keluhan, akan dicek kembali setiap lampiran yang disampaikan pada nadine agar dipastikan semua lampiran ter-DS dengan baik.
5. Pengesahan jadwal pelatihan akan dilakukan segera setelah rapat persiapan (hari H rapat persiapan).
6. ND permintaan pengajar segera diproses setelah adanya rekomendasi pengajar.
7. Akan segera dilakukan pemeliharaan AC secara berkala.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain, melaksanakan rencana tindak lanjut rekomendasi sesuai dengan yang telah tertuang pada BA Nomor BA-8/PP.12/2023 tentang Hasil Audit Penjaminan Mutu Pembelajaran Semester II Tahun 2023.

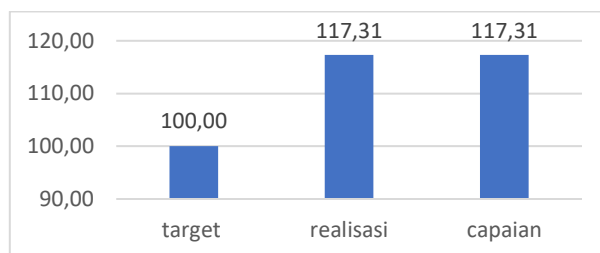


IKU 8. Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM

BDK Yogyakarta 5a-CP	SS – Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif							
	Tingkat kualitas pengelolaan SDM							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Y	Pol/KT
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/TLKV
Realisasi	105,23	118,50%	118,50%	116,01%	116,01%	117,31%	117,31%	
Capaian	105,23	118,50	118,5	116,01	116,01	117,31	117,31	

IKU ini bertujuan untuk memastikan bahwa Pengelolaan SDM Kementerian keuangan mampu memenuhi tujuan organisasi dan kebutuhan *stakeholder*. Indikator pelaksanaan IKU ini adalah tingkat kualitas pengelolaan kompetensi dan talenta serta tingkat implementasi penguatan budaya kemenkeu.

Capaian IKU Tingkat kualitas pengelolaan SDM sampai dengan tahun 2024 dengan target 100 realisasi sebesar 117,31% dan capaian 117,31. Realisasi IKU ini tahun 2024 sebagai mana **grafik 3.8.**



Grafik 3.8. Tingkat Kualitas Pengelolaan SDM

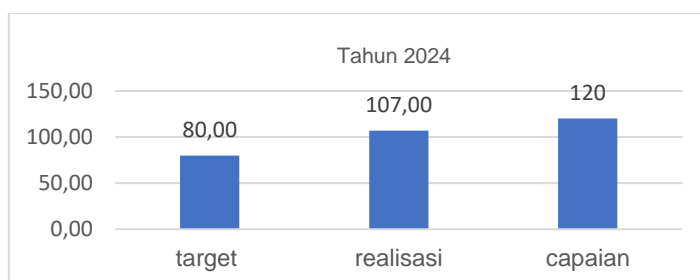
IKU ini merupakan IKU baru yang dilaksanakan tahun 2024, sehingga tidak ada data perbandingan implementasi tahun sebelumnya. Tindakan yang telah dilakukan dalam adalah implementasi penguatan budaya Kemenkeu.

IKU 9. Tingkat kualitas pelaksanaan program/kegiatan kebintalan

BDK Yogyakarta 5b-N	SS – Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif							
	Tingkat kualitas pelaksanaan program/kegiatan kebintalan							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Y	Pol/KT
Target	80	80	80	80	80	80	80	Max/TLKV
Realisasi	118	118	118	118	118	107	107	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

IKU ini bertujuan untuk mengukur implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, dan bidang kejiwaan.

Capaian IKU Tingkat kualitas pelaksanaan program/kegiatan kebintalan sampai dengan tahun 2024 adalah dengan target 80 nilai realisasi 118 dengan nilai capaian sebesar 120.



Grafik 3.9. Tingkat Kualitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kebintalan

IKU ini merupakan IKU baru yang dilaksanakan tahun 2024, sehingga tidak ada data perbandingan implementasi tahun sebelumnya. Tindakan yang telah dilakukan dalam implementasi penguatan budaya Kemenkeu.

Tindakan yang telah dilakukan dalam implementasi IKU ini adalah.

1. Pelaksanaan bintal bidang ideologi dengan tema: Peningkatan Sinergi dan Pelayanan Sebagai Wujud Cinta Tanah Air yang dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2024.
2. Pelaksanaan bintal bidang kejiwaan dalam bentuk Bakti Sosial bersama Panti Asuhan Al-Afiyah pada tanggal 2 Maret 2024.
3. Pelaksanaan bintal bidang kompetensi dalam bentuk Sosialisasi Mengelola Perubahan Dalam Kaitannya dengan Penataan Organisasi pada tanggal 4 Maret 2024.
4. Pelaksanaan bintal bidang kerohanian bertajuk "Tingkatkan Nilai Integritas, Raih Ramadhan Berkualitas" pada tanggal 6 Maret 2024.
5. Pelaksanaan bintal bidang kerohanian dengan tema "Toleransi, Kunci Merawat Keberagaman" pada tanggal 19 April 2024.
6. Pelaksanaan bintal ideologi dalam bentuk Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila pada tanggal 1 Juni 2024.
7. Pelaksanaan bintal bidang kompetensi dalam bentuk Knowledge Sharing Penyusunan Critical Incident pada tanggal 7 Juni 2024.
8. Pelaksanaan bintal bidang kejiwaan dalam bentuk Jumat Resik pada tanggal 7 Juni 2024.
9. Pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 2024.
10. Pelaksanaan KCOC Mental Health Generasi Milenial Y dan Z pada tanggal 5 September 2024.
11. Pelaksanaan Sosialisasi PBJ dan Pengelolaan Keuangan pada tanggal 27 September 2024.
12. Pelaksanaan doa pagi bersama saat ODOI SAKLAWASE.
13. Pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila pada tanggal 1 Oktober 2024.
14. Pelaksanaan bintal bidang kerohanian dalam bentuk Doa Bersama Kementerian Keuangan pada tanggal 22 Oktober 2024.
15. Pelaksanaan bintal bidang kejiwaan dalam bentuk Senam Bersama pada tanggal 1 November 2024.
16. Pelaksanaan bintal bidang kompetensi dengan tema pada tanggal 20 Desember 2024..

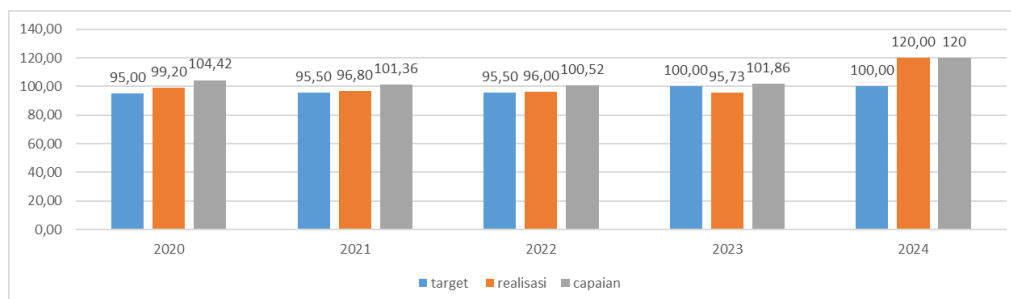


IKU 10. Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 15

BDK Yogyakarta 6a-CP	SS – Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 15							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Y	Po/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLKV
Realisasi	105,26	103,26	103,26	120	120	120	120	
Capaian	105,26	103,26	103,26	120	120	120	120	

Pengelolaan keuangan yang akuntabel adalah pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran dapat dipertanggungjawabkan kepada *stakeholder*. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi *output* sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. IKU ini bertujuan untuk mengukur Indeks opini BPK atas LK BA 15 dan Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran.

Capaian IKU Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 15 sampai dengan tahun 2024 adalah dengan target 100 realisasi sebesar 120 sehingga nilai capaian sebesar 120. Capaian IKU pengelolaan keuangan dalam lima tahun (2020-2024) tahun 2024 merupakan realisasi tertinggi yang mencapai nilai sebesar 120 sebagaimana **Grafik 3.10** berikut.



Grafik 3.10. Indek Kualitas Pengelolaan Keuangan

Isu utama dalam realisasi IKU ini adalah Indikator realisasi anggaran memiliki capaian paling rendah di antara seluruh indikator dalam penilaian pelaksanaan anggaran. Berdasarkan jenis belanja, baik realisasi belanja barang maupun belanja modal sudah melebihi target realisasi anggaran, dan hanya belanja pegawai yang tidak mencapai target 95% dimana terealisasi 93,90%.

Akar masalahnya adalah target realisasi anggaran ditetapkan persentasenya untuk setiap triwulan dan nilai indikator realisasi anggaran di setiap triwulan akan tetap dihitung hingga triwulan IV. Sampai dengan akhir tahun anggaran 2024, target realisasi anggaran telah tercapai namun karena nilai yang diperoleh di triwulan I, II, dan III tetap diperhitungkan, maka nilai indikator realisasi anggaran ini tidak dapat mencapai angka 100.

Tindakan yang telah dilakukan adalah koordinasi intens secara internal organisasi terkait penyelenggaraan KCOC digital untuk memenuhi target capaian output disesuaikan dengan



ketersediaan anggaran. *Extra effort* yang dilakukan adalah melakukan koordinasi secara intens untuk memenuhi target capaian output, agar realisasi kegiatan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan dan selalu melakukan monitoring ketercapaian output setiap bulan.

IKU ini masuk ke dalam pemantauan risiko, yaitu risiko Nilai IKKPA tidak mencapai target dikarenakan deviasi pada realisasi belanja dibandingkan perencanaan. Risiko nilai IKKPA tidak mencapai turun ke level rendah dengan besaran 11. Turunnya besaran menjadi risiko rendah disebabkan angka capaian nilai PKPA di Tahun 2024 telah berada di atas target nilai PKPA (91%) sedangkan realisasinya 98,29% sehingga capaian pada Triwulan IV ini adalah 120.

Mitigasi yang telah dilakukan untuk risiko ini adalah, pemantauan dan review kualitas pelaksanaan anggaran bulanan. Nilai IKPA bulan Desember sebesar 98,28 dengan indikator realisasi anggaran belum bernilai 120. Ini disebabkan oleh tingginya target penyerapan triwulan IV dan untuk mengatasi perubahan kalender pelatihan, koordinasi secara intens terus dilakukan

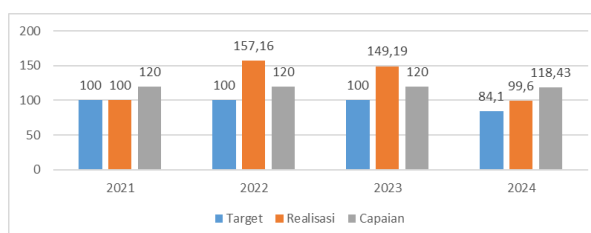
IKU 11. Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan

BDK Yogyakarta 5a-CP	SS – Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan							
T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	42,5	60	60	70	70	84,10	84,10	Max/TLKV
Realisasi	56,07	70,28	70,28	84,93	84,93	99,6	99,6	
Capaian	120	117,13	117,13	120	120	118,43	118,43	

IKU ini bertujuan untuk mengukur Indeks pengelolaan aset (IPA) dan Indeks tata Kelola pengadaan (ITKP).

Capaian IKU Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan perhitungan target tahunan 84,10 nilai realisasi 99,6 dan capaian 118,43. Implementasi IKU ini dalam waktu 2021 sampai dengan 2024 terdapat perbedaan formulasi IKU.

Tahun 2024 formula IKU adalah 60% Indek Pengelolaan Aset (IPA) ditambah 40% Indek Tata Kelola Pengadaan (TKP). Grafik realisasi indek pengelolaan BMN tahun 2021 sampai 2024 sebagaimana **Grafik 3.11**.



Grafik 3.11 Indek Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam IKU Ini adalah.

1. Mengadakan forum PIC pengelolaan BMN secara rutin.



2. Pemutakhiran kondisi barang melalui sensus (proses)

Rekomendasi rencana aksi sebagai berikut.

1. Data profiling BMN dan perhitungan kertas kerja SBSK di lingkungan BPPK dan monitoring.
2. Monitoring pengadaan kegiatan pengadaan.
3. Persiapan penghapusan BMN.

Dalam kaitannya dengan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, kegiatan-kegiatan Balai Diklat Keuangan Yogyakarta sangat mendukung untuk terwujudnya sasaran-sasaran tersebut. Kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan diarahkan dalam rangka peningkatan kualitas layanan baik dari aspek penyelenggaraan, SDM dan sarana prasarannya, pelaksanaan tindak lanjut atas evaluasi diklat. Selain itu, pengembangan teknologi informasi juga selalu ditingkatkan terutama dengan penyelenggaraan pelatihan secara jarak jauh yang membutuhkan dukungan sarana teknologi dan informasi.

3.2 Realisasi Keuangan

Jumlah pagu anggaran Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Yogyakarta pada revisi pagu Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp.5.238.170.000 yang terdiri dari pagu anggaran belanja pegawai sebesar Rp.227.383.000 dan pagu anggaran non belanja pegawai sebesar Rp.5.010.787.000. Pagu anggaran dialokasikan untuk enam *output* yaitu Sarana Bidang Teknologi Informasi, Layanan Dukungan Manajemen Internal, Layanan Sarana dan Prasarana Internal, Pelatihan Bidang Ekonomi dan Keuangan, Layanan Manajemen Internal, Layanan Manajemen SDM Internal. Tahun 2024 total realisasi anggaran sebesar Rp.4.911.583.464 atau sebesar 93,77%. Secara rinci realisasi anggaran Tahun 2024 adalah sebagaimana tersaji pada **Tabel 3.2**.

Tabel 3.2. Realisasi Anggaran Berdasarkan Output TA 2024

Kode	Kegiatan/ Output	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
4679.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	119.160.000	119.150.000	99,99%
4679.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2.228.634.000	2.124.232.880	95,32%
4679.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	123.041.000	119.543.250	97,16%
4683.DCF	Pelatihan Bidang Ekonomi dan Keuangan	2.475.046.000	2.282.843.334	92,23%
4683.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	261.779.000	235.304.000	89,89%
4683.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	30.510.000	30.510.000	100,00%
Jumlah		5.238.170.000	4.911.583.464	93,77%



1. Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

Realisasi anggaran untuk *output* “Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi” sampai dengan Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 119.150.000 atau 99,99% dari pagu yang tersedia untuk *output* tersebut sebesar Rp.119.160.000. Informasi lebih rinci terkait *output* untuk “Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi” dijelaskan dalam Tabel 3.3.

Tabel 3.3. Realisasi Anggaran *Output* Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi TA 2024

<i>Komponen</i>	Anggaran			
	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian	Saldo (Rp)
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	119.160.000	119.150.000	99,99%	10.000
Jumlah	119.160.000	119.150.000	99,99%	10.000

2. Layanan Dukungan Manajemen Internal

Realisasi anggaran untuk *ouput* “Layanan Dukungan Manajemen Internal” Tahun Anggaran 2024 realisasi sebesar Rp.2.124.232.880 (95,32%) dari pagu anggaran yang disediakan sebesar Rp.1.228.634.000. Informasi lebih rinci terkait dengan *output* untuk “Layanan Dukungan Manajemen Internal” dijelaskan dalam **Tabel 3.4.**

Tabel 3.4. Realisasi Anggaran *Output* Layanan Dukungan Manajemen Internal TA 2024

<i>Komponen</i>	Anggaran			
	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian	Saldo (Rp)
Rencana Kebutuhan BMN dan Pengelolaannya Unit	5.000.000	0	0	5.000.000
Kerumahtangaan	78.890.000	52.663.300	66,76%	26.226.700
Layanan Perkantoran	2.144.744.000	2.071.569.580	96,59%	73.174.420
Jumlah	2.228.634.000	2.124.232.880	95,32%	104.401.120

3. Layanan Sarana dan Prasarana Internal

Sampai akhir Tahun 2024, realisasi anggaran untuk *output* “Layanan Sarana dan Prasarana Internal” adalah Rp.119.543.250 (97,16%) dari pagu yang tersedia sebesar Rp. 123.041.000. Secara rinci realisasi anggaran untuk *output* “Layanan Sarana dan Prasarana Internal” tersebut disajikan dalam Tabel 3.5.

Tabel 3.5. Realisasi Anggaran *Output* Layanan Sarana dan Prasarana Internal TA 2024

<i>Komponen</i>	Anggaran			
	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian	Saldo (Rp)
Peralatan Fasilitas Perkantoran	123.041.000	119.543.250	97,16%	3.497.750
Jumlah	123.041.000	119.543.250	97,16%	3.497.750

4. Pelatihan Bidang Ekonomi dan Keuangan

Sampai akhir Tahun 2024, realisasi anggaran untuk *output* “Pelatihan Bidang Ekonomi dan Keuangan” adalah 92,23% atau sebesar Rp.2.282.843.334 dari pagu yang tersedia sebesar Rp.2.475.046. Secara rinci realisasi anggaran untuk *output* “Pelatihan Bidang Ekonomi dan Keuangan” tersebut disajikan dalam Tabel 3.6.

**Tabel 3.6. Realisasi Anggaran Output Pelatihan Bidang Ekonomi dan Keuangan TA 2024**

Komponen	Anggaran			
	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian	Saldo (Rp)
Pembelajaran Digital	384.691.000	352.166.885	91,55%	32.524.115
Pembelajaran Klasikal	1.502.566.000	1.366.938.131	90,97%	135.627.869
Manajemen Pengetahuan	2.300.000	1.000.000	43,48%	1.300.000
Pelatihan dalam Rangka Perluasan JF Pemeriksa Pajak (PU)	338.131.000	329.699.700	97,51%	8.431.300
Pelatihan Optimalisasi Pemanfaatan BMN pada Pemerintah Pusat dan Daerah (PU)	58.860.000	46.386.923	78,81%	12.473.077
Pelatihan Penguatan Pengawasan di Kawasan Perbatasan (PU)	188.498.000	186.651.695	99,02%	1.846.305
Jumlah	2.475.046.000	2.282.843.334	93,77%	326.586.536

5. Layanan Dukungan Manajemen Internal

Realisasi anggaran untuk *output* “Layanan Dukungan Manajemen Internal” sampai dengan Tahun 2024 adalah sebesar 89,89% atau sebesar Rp.235.304.000 dari pagu yang tersedia untuk *output* tersebut sebesar Rp.261.779.000. Informasi lebih rinci terkait *output* untuk “Layanan Dukungan Manajemen Internal” dijelaskan dalam Tabel 3.7.

Tabel 3.7. Realisasi Anggaran Output Layanan Dukungan Manajemen Internal TA 2024

Komponen	Anggaran			
	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian	Saldo (Rp)
AKP Kewilayahan	34.396.000	32.476.000	94,42%	1.920.000
Layanan Perkantoran	227.383.000	202.828.000	89,20%	24.555.000
Jumlah	261.779.000	235.304.000	89,89%	26.475.000

6. Layanan Manajemen SDM Internal

Realisasi anggaran untuk *output* “Layanan Manajemen SDM Internal” sampai dengan Tahun 2024 adalah sebesar 100,00% atau sebesar Rp.30.510.000 dari pagu yang tersedia untuk *output* tersebut sebesar Rp.30.510.000. Informasi lebih rinci terkait *output* untuk “Layanan Manajemen SDM Internal” dijelaskan dalam Tabel 3.8.

Tabel 3.8. Realisasi Anggaran Output Layanan Manajemen SDM Internal TA 2024

Komponen	Anggaran			
	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian	Saldo (Rp)
Pengembangan Sumber Daya Manusia	30.510.000	30.510.000	100%	0
Jumlah	30.510.000	30.510.000	100%	0

3.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya terdapat pada efisiensi anggaran, efisiensi anggaran meliputi,

1. Efisiensi dalam penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. PMK 113/2023 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2024 memberikan batas atas biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 output PKP sebesar Rp.14.643.000. Realisasi di BDK



Yogyakarta, untuk mencapai 1 output pelatihan ini membutuhkan anggaran sejumlah Rp. 8.631.910 (58,95% dr tarif yang ditetapkan). Nilai ini tidak mengikutsertakan biaya perjalanan dinas on campus.

2. Efisiensi penggunaan anggaran juga nampak pada optimalisasi penggunaan kendaraan dinas untuk perjadin pegawai. Pemilihan pengajar mengutamakan widyaiswara dibandingkan eksternal BPPK dan eksternal Kemenkeu. Penyusunan dokumen pengetahuan mengoptimalkan penggunaan sumber daya internal, baik SDM maupun peralatan dan sarpras, sehingga meminimalisir penggunaan anggaran.
3. Efisiensi penggunaan daya listrik, penggunaan listrik dimanfaatkan seefisien mungkin dengan tidak menyalakan lampu dan AC di ruangan yang tidak digunakan.

3.4 Kinerja Lain-lain

Capaian lain yang diperoleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Yogyakarta sepanjang tahun 2024 antara lain;

a. Achievement dan Penghargaan

1. Peringkat 2 Unit Kepatuhan Internal Terbaik tingkat BPPK
2. Peringkat 2 Pengelolaan BMN Terbaik Kategori Satuan Kerja BMN/Anak Satuan Kerja BMN Besar (>5.000 NUP) tingkat BPPK
3. Peringkat 3 Lomba Inovasi Kategori Instansi Vertikal BPPK dengan tema inovasi PIA PATOK (Program Informasi dan Pembelajaran Lewat Tik Tok).

b. Inovasi

Dalam rangka mendukung pengadministrasian dokumen pembelajaran dan sebagai sarana untuk mendukung program pembelajaran, Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Yogyakarta menyusun sebuah inovasi dengan Judul “SIDO MAMPIR BDK YOGYA” (Sistem Dokumentasi Manajemen Pembelajaran terintegrasi di BDK Yogya).

c. Penyajian Informasi Replikasi Sistem

Tahun 2023 Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan membuat suatu inovasi berjudul “Pembelajaran Terintegrasi untuk Mendorong UMKM Naik Kelas”. Inovasi tersebut bertujuan untuk memberdayakan UMKM dengan pembelajaran terintegrasi serta memberikan fasilitasi pemasaran di BDK Yogyakarta dan pameran pada event-event Kemenkeu Satu DIY. Tahun 2024 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Yogyakarta melalui Nota Dinas ND-82/KBC.1008/2024 tanggal 17 Januari 2024 menyampaikan untuk melakukan adopsi Model Pembelajaran Terintegrasi bagi UMKM binaan KPPBC Yogyakarta dalam kegiatan Program Pengusahaan Wanita Mandiri (PROSTARI).



3.5 Evaluasi Peningkatan Kinerja

Secara umum kegiatan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Yogyakarta telah berjalan sesuai dengan rencana dan beberapa indikasi pengukuran kinerja menunjukkan hal yang positif, pelatihan tatap muka mulai kembali dilaksanakan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai upaya peningkatan kinerja untuk ke depannya

1. Meningkatkan upaya-upaya kolaborasi dan koordinasi dengan semua *stakeholder* dalam rangka meningkatkan sinergi.
2. Meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian disertai dengan penerapan manajemen risiko dalam pelaksanaan kegiatan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Yogyakarta sesuai dengan budaya Kementerian Keuangan.
3. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada, baik berupa manusia, anggaran, maupun sarana dan prasarana untuk dapat meningkatkan kinerja dan kepuasan, terutama dalam penyelenggaraan sistem pelatihan.
4. Melakukan perbaikan dari hasil evaluasi yang konstruktif, evaluasi konstruktif untuk mendapatkan akar permasalahan dan menghasilkan rekomendasi yang akurat serta menyelesaikan masalah untuk mencapai target kinerja yang maksimal



BAB IV PENUTUP

4.1 Simpulan

Laporan Kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Yogyakarta Tahun 2024 menyajikan berbagai realisasi kinerja dan anggaran tahun 2024 (Januari s.d. Desember) serta upaya-upaya dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja tersebut. Secara umum capaian indikator kinerja utama menunjukkan hasil yang positif. Dari sebelas IKU seluruh IKU telah mencapai target yang ditetapkan. Dari segi anggaran, Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Yogyakarta dapat merealisasikan anggaran sebesar 93,77% selama tahun 2024. Secara umum hasil capaian kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Yogyakarta Tahun 2024 sudah sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan, namun masih terdapat beberapa kendala dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian.



Lampiran I Rekapitulasi Peserta Pelatihan

No	Pelatihan	Tgl Penyelenggaraan	Rencana	Realisasi
1	Pelatihan Teknis Identifikasi Keaslian Pita Cukai	23 Jan s.d. 6 Feb 2024	20	28
2	PJJ Peneliti Dokumen Tingkat Dasar	22 Jan s.d. 13 Feb 2024	30	29
3	PJJ Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Angkatan I	29 Jan s.d. 2 Feb 024	50	58
4	PJJ Manajemen Pelayanan Angkatan I	19 s.d. 23 Feb 2024	30	26
5	Lokakarya Pengelolaan Uang Persediaan Bagi Bendahara Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Angkatan I	27 s.d. 29 Feb 2024	50	48
6	PJJ Peningkatan Kompetensi Public Speaking Tingkat Dasar Angkatan I	19 Feb s.d. 8 Mar 2024	20	28
7	Pelatihan Pejabat Lelang	19 Feb s.d. 8 Mar 2024	30	24
8	PJJ Pengawasan dan Pengendalian BMN pada Pengguna Barang	4 s.d. 7 Mar 2024	35	35
9	PJJ Pejabat Pembuat Komitmen Angkatan I	26 Feb s.d. 1 Mar 2024	50	51
10	PJJ Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Angkatan II	18 s.d. 22 Mar 2024	50	53
11	PJJ Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Angkatan I	18 s.d. 22 Mar 2024	50	59
12	PJJ Analisis Laporan Keuangan Perusahaan Tingkat Dasar	22 Apr s.d 6 Mei 2024	30	30
13	PJJ Penyegaran Pengurusan Piutang Negara	29 Apr s.d 6 Mei 2024	22	23
14	PJJ Ekonometrika Tingkat Lanjutan	23 Apr s.d. 31 Mei 2024	22	20
15	PJJ Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Eskpor (KITE)	29 Apr s.d 20 Mei 2024	30	39
16	PJJ Analisis Kinerja pada Badan Usaha/BLU/Badan Hukum Lainnya	6 s.d. 14 Mei 2024	22	23
17	PJJ Administrator Sistem I Angkatan I	7 s.d. 21 Mei 2024	27	24
18	PJJ Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Angkatan III	13 s.d. 17 Mei 2024	50	52
19	PJJ Transfer Pricing I Angkatan I	13 s.d. 17 Mei 2024	30	30
20	Pelatihan Teknis Monitoring dan Evaluasi Fasilitas TPB dan KITE Berbasis Analisis IT Inventory	13 s.d. 20 Mei 2024	30	30
21	PJJ Excellent Frontliners Angkatan I	20 s.d. 22 Mei 2024	30	29
22	Pelatihan Penilaian Sumber Daya Energi Terbarukan Berupa Panas Bumi (Blended Learning)	20 s.d. 31 Mei 2024	30	30
23	PJJ Legal Drafting	27 s.d. 31 Mei 2024	30	31
24	PJJ Pejabat Pembuat Komitmen Angkatan II	27 s.d. 31 Mei 2024	50	48
25	PJJ Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Angkatan IV	27 s.d. 31 Mei 2024	50	51
26	PJJ Pengawasan Pajak Ekonomi Digital Angkatan I	27 s.d. 31 Mei 2024	30	29
27	PJJ Pajak Menengah Angkatan I	8 Mei s.d. 4 Juni 2024	30	29
28	PJJ Ekonometrikan Tingkat Dasar	6 Mei s.d. 3 Juni 2024	30	29
29	PJJ Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Akt.II	3 s.d. 6 Juni 2024	50	56
30	PJJ Kebijakan Pengelolaan Transfer ke Daerah (TKD) Bagi Pegawai DJPB	3 s.d. 5 Juni 2024	31	30
31	Pelatihan Penilaian Jaminan bagi Pegawai Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (<i>Blended Learning</i>)	3 s.d. 12 Juni 2024	25	25
32	Pelatihan Teknis Pencegahan dan Penanganan Konflik (De-Eskalasi) Akt.III - Klasikal	10 s.d. 13 Juni 2024	30	30
33	PJJ Penguatan Strategi Komunikasi	10 s.d. 14 Juni 2024	34	30
34	Pelatihan Aplikasi SIMAN Pengguna Barang - Klasikal	24 s.d. 28 Juni 2024	32	28



No	Pelatihan	Tgl Penyelenggaraan	Rencana	Realisasi
35	Pelatihan Pemeriksa Pajak Daerah Akt.I - Klasikal	24 s.d. 28 Juni 2024	35	32
36	PJJ Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Akt.V	24 s.d. 28 Juni 2024	50	51
37	Pelatihan Teknis Pencegahan dan Penanganan Konflik (De-Eskalasi) Akt.V	1 s.d. 5 Juli 2024	30	30
38	PJJ Pejabat Pembuat Komitmen Akt.III	1 s.d. 5 Juli 2024	50	41
39	Pelatihan Persiapan Purnabhakti Kelas Reguler (Blended Learning)	26 Juni s.d. 2 Juli 2024	30	28
40	PJJ Effective Negotiation Skills Tingkat Lanjutan Akt.I	2 Jul s.d. 1 Agus 2024	28	23
41	Pelatihan PBB P2 dan BPHTB Akt.I - Klasikal	8 s.d. 12 Juli 2024	35	35
42	PJJ Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah	8 s.d. 12 Juli 2024	35	30
43	PJJ Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Akt.VI	8 s.d. 12 Juli 2024	50	46
44	Pelatihan Pengelolaan Kekayaan Negara Lain-lain Lingkup I (Blended)	10 s.d. 19 Juli 2024	20	19
45	Pelatihan PBB P2 dan BPHTB Akt.II - Klasikal	15 s.d. 19 Juli 2024	35	36
46	PJJ Communication Skills Tingkat Dasar Akt.I	16 s.d. 18 Juli 2024	30	29
47	PJJ Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Akt.VII	22 s.d. 26 Juli 2024	50	43
48	PJJ PPSPM Angkatan III	29 Jul s.d 2 Agus 2024	50	48
49	PJJ Multimedia dan Desain Grafis	22 Jul s.d. 28 Agus 2024	28	19
50	Pelatihan Pengelolaan Keuangan Daerah Bagi Pegawai DJPB	5 s.d. 9 Agus 2024	31	31
51	PJJ Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Akt.VIII	19 s.d. 23 Agus 2023	50	55
52	Lokakarya Pengusulan dan Kolaborasi Pemeriksaan Bukti Permulaan Akt.I	26 s.d. 28 Agus 2024	50	30
53	PJJ Sekretaris Pimpinan	26 Agus s.d. 13 Sept 2024	30	29
54	PJJ Data Driven Decision Making	2 s.d. 10 Sept 2024	30	29
55	PJJ Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Akt IX	2 s.d. 6 Sept 2024	50	33
56	PJJ Manajemen Risiko Kelas Reguler	9 s.d. 20 Sept 2024	34	30
57	PJJ Public Speaking Tk Dasar	9 s.d. 27 Sept 2024	28	27
58	Pelatihan Teknis Mengemudi dalam Rangka Patroli Darat Unit Bea dan Cukai	18 s.d. 19 Sept 2024	25	25
59	PJJ Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Akt X	23 s.d. 27 Sept 2024	50	48
60	PJJ Transfer Pricing II Angkatan I	23 s.d. 27 Sept 2024	30	25
61	PJJ Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar Angkatan IV	30 Sept s.d. 4 Okt 2024	50	61
62	Pelatihan Trainer Aplikasi Coretax Modul Pengawasan dan Pemeriksaan Akt I	30 Sept s.d. 3 Okt 2024	77	78
63	Pelatihan Trainer Aplikasi Coretax Modul Pelayanan dan Penyuluhan Akt I	7 s.d. 10 Okt 2024	77	76
64	PJJ Persiapan Uji Kompetensi Pengangkatan dan Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang Jenjang Penyelia di Lingkup Pemerintah Pusat Angkatan II	7 s.d. 21 Okt 2024	30	34
65	PJJ Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Akt XI	7 s.d. 11 Okt 2024	50	39
66	PJJ Pengolahan Data dan Aplikasi Perkantoran	7 s.d. 15 Okt 2024	33	28
67	Pelatihan Trainer Aplikasi Coretax Modul Pengawasan dan Pemeriksaan Akt II	14 s.d. 17 Okt 2024	77	76
68	PJJ Jurusita Pajak Angkatan I	14 s.d. 23 Okt 2024	30	30



No	Pelatihan	Tgl Penyelenggaraan	Rencana	Realisasi
69	PJJ Pejabat Pembuat Komitmen Akt.IV	14 s.d. 18 Okt 2024	50	60
70	PJJ Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Akt XII	21 s.d. 25 Okt 2024	50	32
71	PJJ Data Analytics	23 Sept s.d. 1 Nov 2024	32	14
72	PJJ Pejabat Pembuat Komitmen Akt V	28 Okt s.d. 1 1 Nov 2024	50	62
73	PJJ Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar Angkatan V	4 s.d. 8 Nov 2024	50	61
74	Pelatihan Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Blended Learning) Akt.III	21 Okt s.d. 13 Nov 2024	32	32
75	PJJ Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar Angkatan VI	11 s.d. 15 Nov 2024	50	48
76	PJJ Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar Angkatan VII	18 s.d. 22 Nov 2024	50	97
77	PJJ Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Akt XIII	18 s.d. 22 Nov 2024	50	45
78	Bimtek Keprotokolan	5 Nov 2024	30	30
79	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan XXII	26 Jul s.d. 29 Nov 2024	30	33
Total Peserta			2.997	2.993
1	Kemenkeu Corpu <i>Open Class</i> "Hospitality dan <i>Upgrade Skill</i> bagi Tenaga Honorer Tahun Anggaran 2024"	6 Februari 2024	30	34
2	Kemenkeu Corporate University Open Class "Pusing dengan Sampah? Ubah jadi Mutiara Hitam, Dengan Teknik EMPUK, Semua Bisa...!!!"	22 Mei 2024	50	57
3	Kementerian Keuangan Corporate University Open Class "Mental Health Generasi Milenial dan Z untuk Kinerja Best"	5 September 2024	100	83
4	Kemenkeu Corporate University Open Class "Kemana Uangmu Digunakan? Itu yang Menentukan Masa Depanmu!"	18 Desember 2024	100	127
Total Peserta			280	301